

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pergerakan ekonomi merupakan suatu kondisi yang bergerak dinamis, oleh karena itu setiap perusahaan harus siap bersaing dan bertahan dalam setiap kondisi ekonomi, serta perusahaan dituntut untuk memperkuat fundamental manajemen, yaitu tindakan pemilihan obyek, kebijakan, program dan prosedur untuk mencapai tujuan (sasaran) dengan menggunakan data, fakta, asumsi, ramalan (forecasting) terhadap lingkungan yang mempengaruhi rencana tersebut. Perusahaan harus senantiasa mendukung untuk menjaga dan meningkatkan kinerjanya disetiap lini usaha pada perusahaan, baik itu perusahaan jasa, perusahaan perdagangan, maupun perusahaan manufaktur. Ketidakmampuan perusahaan memperkuat fundamental manajemen dalam mengantisipasi perkembangan perekonomian global akan mengakibatkan pengecilan volume usaha yang pada akhirnya perusahaan akan mengalami kebangkrutan (Udin dkk, 2017)

Pada tahun 2008 perekonomian Indonesia mengalami situasi dimana keadaan perekonomian yang kurang kondusif, keadaan tersebut terjadi karena adanya imbas dari *Global Financial Crisis*, yang mengakibatkan banyak perusahaan yang tingkat kesehatannya terganggu dan mengalami kesulitan keuangan sehingga tidak dapat melunasi kewajiban keuangan yang telah jatuh tempo dan akhirnya dinyatakan pailit. Selain itu, rata-rata perusahaan menanggung biaya operasional yang lebih besar dari laba. Hal ini memperburuk kondisi perekonomian Indonesia karena dengan banyaknya perusahaan yang tutup membuat semakin banyak yang menganggur,

sehingga angka kejahatan semakin tinggi. Peristiwa ini merupakan peristiwa berkala seperti tahun 1997-1998, 2008-2009. dan untuk tahun 2019-2020, dengan melihat situasi perekonomian Indonesia saat ini yang diakibatkan wabah Covid-19 (Moch, 2019).

Indonesia merupakan negara berkembang dengan memiliki badan usaha sendiri yang bergerak dalam berbagai bidang. Badan usaha yang langsung di bawah pemerintah tersebut disebut Badan Usaha Milik Negara (BUMN). BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Ada 115 perusahaan dari 13 sektor yang dimiliki BUMN dan 20 diantaranya tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI). Ada beberapa perusahaan yang sebelumnya masuk dan tahun ini tidak dimasukkan dikarenakan telah diwakilkan oleh induk perusahaan/holding. Bursa Efek Indonesia (BEI) merupakan suatu lembaga yang didirikan dengan tujuan mengelola dan memfasilitasi perdagangan pasar modal di Indonesia.

BUMN yang berperan dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat karena semua faktor ekonomi, sumber daya manusia dan faktor-faktor produksi yang dikuasai oleh negara dan dialokasikan pengelolaannya oleh negara kepada organisasi, badan usaha dan individu untuk kesejahteraan rakyatnya. Maka dari itu diperlukan adanya peningkatan kinerja BUMN agar terciptanya kepercayaan publik (Marota dkk, 2019). Beberapa tahun terakhir perusahaan BUMN mengalami penurunan kinerja pada pergerakan ekonomi di Indonesia.

Kementrian BUMN elah merilis laporan keuangan pada semester 1 2020. Banyak diantaranya yang secara kinerja anjlok akibat hantaman pandemi Covid-19, bahkan hingga mengalami kerugian triliun rupiah. Menteri BUMN, Erick Thohir sempat menyebutkan, hanya ada 10% perusahaan plat merah saja yang masih bertahan akibat pandemi ini. Badan Pusat Statistik (BPS) juga mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal II (Q2) 2020 mengalami kontraksi sebesar 5,32 persen *year on year*. Angka ini memburuk dari Q1 2020 yang mencapai 2,97 persen dan Q2 2019 yang mencapai 5,05 persen (<https://bps.go.id>).

Menurut (Idhom, 2017) Pada periode semester 1 2017, ada 24 perusahaan milik negara yang masih merugi. Perusahaan-perusahaan tersebut yang memiliki laba negatif diantaranya adalah PT Aneka Tambang Tbk, PT Garuda Indonesia Tbk, PT Indofarma Tbk dan PT Krakatau Steel Tbk. Hal ini dapat dilihat dari data keuangan:

Tabel 1.1
Nilai *Debt to Equity Ratio* (DER) Pada Perusahaan BUMN yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2019

Kode Perusahaan	Nilai DER			
	2016	2017	2018	2019
1 ADHI	2,69	3,83	2,64	4,34
2 ANTM	0,63	0,62	0,72	0,67
3 BBNI	5,52	5,79	6,08	5,35
4 BBRI	5,84	5,73	5,92	6,79
5 BBTN	10,2	10,34	10,02	11,3
6 BMRI	5,38	5,22	5,09	4,91
7 GIAA	2,7	3,01	4,08	5,18
8 INAF	1,4	1,91	2,1	1,74
9 JSMR	2,27	3,31	3,01	3,3
10 KAEF	1,03	1,37	2,1	1,48
11 KRAS	1,14	1,22	1,4	8,23
12 PGAS	1,16	0,97	1,01	1,28
13 PTBA	0,76	0,59	0,51	0,42
14 PTPP	1,89	1,93	2,19	2,41
15 SMBR	0,4	0,48	0,58	0,6
16 SMGR	0,45	0,61	0,56	1,3
17 TINS	0,69	0,96	1,15	2,87
18 TLKM	0,7	0,77	0,93	0,89
19 WSKT	2,66	3,3	3,3	3,21
20 WIKA	1,49	2,12	2,7	2,23
Rata-rata	2,45	2,70	2,80	3,43

Sumber : <http://www.idx.co.id> (data diolah)

Tabel 1.2
Nilai *Net Profit Margin* (NPM) Pada Perusahaan BUMN
yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia
Periode 2016-2019

Kode Perusahaan	Nilai NPM			
	2016	2017	2016	2019
1	ADHI	2,85	ADHI	2,85
2	ANTM	0,71	ANTM	0,71
3	BBNI	26,07	BBNI	26,07
4	BBRI	28,46	BBRI	28,46
5	BBTN	15,28	BBTN	15,28
6	BMRI	19,1	BMRI	19,1
7	GIAA	0,24	GIAA	0,24
8	INAF	-1,04	INAF	-1,04
9	JSMR	10,82	JSMR	10,82
10	KAEF	4,67	KAEF	4,67
11	KRAS	-13,44	KRAS	-13,44
12	PGAS	10,51	PGAS	10,51
13	PTBA	14,4	PTBA	14,4
14	PTPP	7	PTPP	7
15	SMBR	17,01	SMBR	17,01
16	SMGR	17,35	SMGR	17,35
17	TINS	3,62	TINS	3,62
18	TLKM	25,08	TLKM	25,08
19	WSKT	7,62	WSKT	7,62
20	WIKA	7,32	WIKA	7,32
	Rata-rata	10,18	Rata-rata	10,18

Sumber : <http://www.idx.co.id> (data diolah)

Dari tabel diatas dapat disajikan nilai rata-rata *leverage* (DER) dan profitabilitas (NPM) pada perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2019 dalam bentuk Grafik dibawah ini.

Grafik 1.1
Perbandingan Nilai Rata-rata *Leverage* (DER) dan Profitabilitas (NPM)
Pada Perusahaan BUMN yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia
Periode 2016-2019



Sumber : <http://www.idx.co.id> (data diolah)

Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa nilai rata-rata *leverage* (DER) pada perusahaan BUMN mengalami kenaikan 63% dari 2,80 ditahun 2018 menjadi 3,43 ditahun 2019, artinya tingkat penghasilan uang untuk memenuhi kewajiban membayar hutang perusahaan tergolong rendah. Ini menandakan bahwa kesehatan perusahaan sedang tidak baik. Dengan melihat kondisi tersebut, setiap perusahaan diharapkan dapat dengan cepat dan tepat dalam mengambil keputusan dan mengambil tindakan untuk memperbaiki kondisi (*financial distress*) tersebut agar perusahaan tidak berakhir dengan kebangkrutan.

Berdasarkan teori keagenan (Ghozali, 2020), masalah keagenan akan timbul apabila kepentingan prinsipal dan agen tidak searah dan prinsipal kurang informasi untuk menilai perilaku agen secara akurat (Eisenhardt, 1989). Untuk mengurangi masalah keagenan tersebut salah satu caranya adalah dengan adanya dewan direksi dan kebijakan hutang. Dengan adanya kepemilikan tersebut, manajemen akan merasakan langsung dampak dari setiap keputusannya termasuk dalam menentukan kebijakan hutang dalam sebuah perusahaan (Jensen dan Meckling, 1976). Semakin tinggi pemegang kepentingan maka semakin tinggi hutang. Hal ini terjadi karena kontrol yang besar dari pihak manajerial yang menyebabkan mereka mampu melakukan investasi dengan lebih baik sehingga memerlukan tambahan dana investasi dengan lebih baik sehingga memerlukan dana tambahan melalui hutang (Kahar, 2008).

Begitu juga dengan nilai rata-rata profitabilitas (NPM) pada perusahaan BUMN yang mengalami penurunan -3,26% dari 9,94 menjadi 6,68 persen ditahun 2019. Kondisi ini menandakan bahwa kinerja perusahaan sedang tidak produktif.

Ini akan menyebabkan kurangnya kepercayaan investor dalam menanamkan modalnya pada perusahaan tersebut. Jika keadaan ini tidak segera diatasi maka dikhawatirkan perusahaan akan mengalami *financial distress*.

Menurut (Lintner, 1965) Risiko dan Return mempunyai hubungan timbal balik, umumnya tingginya risiko atau tingkat hutang maka semakin tinggi pula return atau pendapatan yang akan diperoleh, ini sesuai dengan teori Keynes yang menyatakan bahwa *high risk, high return*. Tetapi dapat dilihat pada grafik 1.1 diatas bahwa tingkat hutang (DER) yang semakin tinggi justru membuat pendapatan (NPM) menurun. Ini membuktikan bahwa perusahaan sedang berada pada kondisi keuangan yang tidak sehat (*financial distress*).

Financial distress adalah suatu kondisi dimana perusahaan sedang menghadapi kesulitan keuangan. Menurut (Platt dan Platt, 2002), *financial distress* didefenisikan sebagai tahap penurunan kondisi keuangan sebelum terjadinya kebangkrutan atau likuidasi. Kebangkrutan diartikan sebagai kegagalan perusahaan dalam menjalankan operasi untuk mencapai tujuannya. Menurut (Marota, 2019) kegagalan ekonomis dapat berarti bahwa pendapatan perusahaan tidak mampu menutup biaya sendiri. Sedangkan, kegagalan keuangan berarti perusahaan tidak dapat memenuhi kewajibannya, walaupun total nilai aset melebihi kewajiban totalnya.

Istilah *financial distress* mencerminkan adanya permasalahan dengan likuiditas yang tidak dapat dijawab atau diatasi tanpa harus melakukan keuangan jangka pendek atau tidak mampu membayar kewajiban keuangan pada saat jatuh temponya maka akan menimbulkan permasalahan yang lebih besar yaitu menjadi

tidak *solvable* yaitu jumlah liabilitas lebih besar dari pada jumlah aset, dan akhirnya mengalami kebangkrutan (Munawir, 2013).

Indikator *financial distress* perusahaan dapat dilihat dari kegagalan perusahaan dalam menghasilkan laba. Untuk mengestimasi dan meminimalisir terjadinya kebangkrutan, perusahaan dapat mengawasi kinerja keuangan dan manajemen suatu perusahaan. Dalam me-manajemen suatu perusahaan diperlukan tata kelola yang baik. *Good Corporate Governance (DD)* merupakan salah satu elemen kunci dalam pengoptimalan kinerja, yang berguna dalam memperoleh hasil yang maksimal. *Corporate governance* merupakan suatu sistem hubungan yang didefinisikan sebagai struktur dan proses (ICGM, 2014).

Krisis yang berkepanjangan melanda Indonesia sejak tahun 1998 menimbulkan berbagai dampak negatif. Sebagaimana yang dikemukakan Baird (2000) bahwa salah satu akar penyebab timbulnya krisis ekonomi di Indonesia dan juga diberbagai negara Asia lainnya adalah buruknya pelaksanaan *corporate governance*. Baik perusahaan yang dimiliki pemerintah (BUMN) maupun yang dimiliki swasta.

Sedikitnya penelitian *Good Corporate Governance (DD)* pada *financial distress* maka dari itu peneliti tertarik dalam meneliti *Good Corporate Governance (DD)* terhadap *financial distress*. *Good Corporate Governance (DD)* memiliki tujuan untuk memastikan manajer selalu mengambil tindakan yang tepat agar semua pihak baik internal maupun eksternal perusahaan mendapatkan keuntungan. Dengan kata lain, dalam penerapan *Good Corporate Governance (DD)* manajer tidak boleh mementingkan kepentingannya sendiri, melainkan manajer juga harus

memperhatikan kepentingan *stakeholder* (Helena, 2018). Penerapan mekanisme *Good Corporate Governance (DD)* yang baik akan meminimalkan risiko perusahaan yang mengalami kondisi *financial distress*. Adapun mekanisme *corporate governance* yang diteliti dalam penelitian ini ialah dewan direksi.

Dewan Direksi dalam suatu perusahaan akan menentukan kebijakan atau strategi yang akan diambil, baik jangka pendek maupun jangka panjang (Bodroastuti, 2009). Helena (2018) menyatakan bahwa dewan direksi yang akan bertanggung jawab terhadap pengelolaan perusahaan agar dapat menghasilkan laba, dan yang akan memastikan kesinambungan usaha perusahaan. Fungsi pengelolaan perusahaan oleh Direksi mencakup lima tugas utama yaitu kepengurusan, manajemen risiko, pengendalian internal, komunikasi, dan tanggung jawab sosial (KNKG, 2006).

Secara empiris, hasil penelitian mengenai pengaruh dewan direksi masih menunjukkan hasil yang tidak konsisten. Hasil penelitian (Helena, 2018); dan (Bodroastuti, 2009) menunjukkan bahwa, dewan direksi berpengaruh positif terhadap *financial distress*. Sebaliknya, (Rahmawati dkk, 2017) menemukan dewan direksi berpengaruh negatif terhadap *financial distress*.

Adanya *leverage* (DER) juga dapat digunakan untuk memprediksi terjadinya *financial distress*. Menurut (Christine dkk, 2019), rasio *leverage* (DER) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa besar hutang yang digunakan dalam jangka panjang. Rasio *leverage* (DER) yang terlalu tinggi dapat menyebabkan perusahaan memiliki tingkat hutang yang tinggi yang dapat membuat perusahaan terbebani disaat jatuh tempo. Apabila perusahaan gagal membayar

kewajibannya maka akan mengganggu aktivitas operasional dan akan menyebabkan berkurangnya tingkat pendapatan (Rohmadini dkk, 2018).

Rasio *leverage* (DER) yang digunakan pada penelitian ini yaitu *dept ratio*. *Dept ratio* adalah rasio utang terhadap total aset perusahaan yang dihitung berdasarkan seluruh utang yang dibandingkan dengan seluruh aktiva (Ananto dkk, 2017). Apabila suatu perusahaan banyak menggunakan utang dalam pembiayaan maka hal ini akan berisiko akan terjadinya kesulitan pembayaran dimasa yang akan datang, oleh karena itu perusahaan akan mengalami *financial distress*. Ini menunjukkan *laverage* berpengaruh terhadap *financial distress*.

Hasil penelitian mengenai pengaruh *laverage* masih menunjukkan hasil yang berbeda. Hasil penelitian (Ariawan, 2015); dan (Atika, 2019) menunjukkan bahwa, *leverage* (DER) berpengaruh negatif signifikan terhadap *financial distress*. Sebaliknya, penelitian (Thahjono, 2016) menemukan bahwa *leverage* (DER) tidak berpengaruh signifikan terhadap *financial distress*.

Selain GCG (DD) dan *leverage* (DER), profitabilitas (NPM) juga dapat digunakan untuk memprediksi terjadinya *financial distress*, rasio profitabilitas (NPM) merupakan rasio yang mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba bersih pada tingkat penjualan, aset, dan modal saham (Atika dkk, 2020). Menurut Andriyani dkk, (2018) mengukur profitabilitas (NPM) dengan efektivitas manajemen ditujukan oleh besar kecilnya tingkat keuntungan yang diperoleh dalam hubungannya dengan penjualan maupun investasi. Semakin tinggi profitabilitas (NPM) pada suatu perusahaan maka semakin kecil perusahaan tersebut mengalami

financial distress, ini menunjukkan bahwa rasio profitabilitas (NPM) mampu mempengaruhi kondisi *financial distress*.

Pada penelitian ini yang berbeda dengan penelitian sebelumnya adalah peneliti menggunakan variabel X nya yaitu *Good Corporate Governance* (GCG), *Leverage* (DER), dan Profitabilitas (NPM) Sedangkan pada penelitian sebelumnya yang diteliti oleh (Marota, 2019) tentang Pengaruh *Debt To Assets Ratio* (DAR), *Current Ratio* (CR) dan *Corporate Governance* dalam Memprediksi *Financial Distress*. Namun pada penelitian ini sama-sama menggunakan variabel Y yaitu *Financial Distress*. Kemudian yang menjadi pembeda adalah periodenya dan objek yang diteliti, pada penelitian ini peneliti meneliti periode 2016-2019 pada Perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Sedangkan penelitian sebelumnya mengambil periode 2013-2017 pada perusahaan pada Perusahaan BUMN Sektor Non Keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

Secara empiris, hasil penelitian mengenai pengaruh profitabilitas (NPM) masih menunjukkan hasil yang tidak konsisten. Hasil penelitian (Assaji, 2017); dan (Nugraha, 2018) menemukan bahwa profitabilitas (NPM) berpengaruh negatif signifikan terhadap *financial distress*. Sebaliknya, (Wijarnarto, 2017); dan (Murni, 2018) menemukan bahwa profitabilitas (NPM) berpengaruh positif signifikan terhadap *financial distress*. Banyaknya peneliti yang meneliti *financial distress* dengan mengukur profitabilitas menggunakan *Return On Asset* (ROA) maka dari itu peneliti tertarik mengukur *financial distress* dengan menggunakan *Net Profit Margin* (NPM).

Berdasarkan permasalahan diatas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian lebih lanjut dengan tahun penelitian yang berbeda dengan peneliti terdahulu yang berjudul “**Analisis *Good Corporate Governance (DD)*, *Leverage (DER)*, dan *Profitabilitas (NPM)* terhadap *Financial Distress* pada perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada Tahun 2016-2019**”.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penelitian dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah jumlah anggota dewan direksi dapat berpengaruh terhadap *financial distress*?
2. Apakah *leverage (DER)* berpengaruh terhadap *financial distress*?
3. Apakah profitabilitas (NPM) dapat berpengaruh terhadap *financial distress*?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah diatas, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis pengaruh dewan direksi terhadap terjadinya kondisi *financial distress* pada perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2019.
2. Untuk menganalisis pengaruh *leverage (DER)* terhadap terjadinya kondisi *financial distress* pada perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2019.

3. Untuk menganalisis pengaruh profitabilitas (NPM) terhadap terjadinya kondisi *financial distress* pada perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2019.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak sebagai berikut :

- a. Bagi Perusahaan

Penelitian ini dapat memberikan pemahaman tentang kondisi *financial distress* agar perusahaan dapat menghindari terjadinya kondisi *financial distress* serta dapat membantu perusahaan dalam pengambilan keputusan yang tepat.

- b. Bagi Investor

Penelitian ini dapat memberikan informasi tentang kondisi perusahaan dan juga bisa digunakan sebagai pertimbangan sebelum pengambilan keputusan investasi.

- c. Bagi Kalangan Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan di kalangan akademisi dan dapat digunakan sebagai acuan dalam penelitian sejenis, serta hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan kajian referensi dan teoritis.